

FAKTOR IDEOLOGI DALAM SIKAP KRITIS POLITIK LUAR NEGERI IRAN TERHADAP BARAT

Ramdhan Muhaimin

Prodi Hubungan Internasional, Universitas Al Azhar Indonesia

ramadhan.muhaimin@uai.ac.id

Abstract

Iran is one of the countries in the Middle East that has always been oppositional of the United States (US) and Western hegemony in the region. Iran's foreign policy is critical of the US and the West has emerged especially after the revolution in 1979. This critical attitude is compounded by Iran's nuclear technology capabilities. So, in the Middle East, there are two countries with nuclear technology capabilities for both civilian and military purposes: Iran and Israel. While the US called Iran 'the axis of evil' and is a supporter of global terrorism. Iran's relations with Western countries have been always conflictual because of Western distrust. Through an analytical descriptive qualitative method, this research will collect data and information from the library (library research) to analyze constructivism factors as the background of Iran's critical attitude. The constructivism approach in this research is the factor of history and collective identity in the form of the Iranian nation's ideology. From the literature, this research concludes that attitudes in Iran's foreign policy are influenced by the theology of Imamah or itsna asyariah as the ideology of the Iranian people. The ideology of the Shia believes that the establishment of the Republic of Islamic State is a 'stage' to welcome the arrival of Imam Mahdi. Iran's foreign policy aims to maintain this goal. This factor stimulated the revolutionary 1979 so that Iran's conflicting relations with the West.

Keywords: *Iran, US, Islamic Revolutionary, Ideology, Constructivism*

Pendahuluan

Timur Tengah merupakan kawasan strategis dan krusial dalam dinamika geopolitik global. Timur Tengah seringkali menjadi episentrum yang menentukan bagi keseimbangan politik dunia. Tensi ketegangan yang terjadi di kawasan ini selalu berdampak langsung terhadap kawasan di sekitarnya. Pengaruh negara-negara besar hadir di kawasan ini dalam bentuk militer, politik dan ekonomi, karena kawasan ini memiliki sumber energi utama yang diperlukan dunia. Banyak argumentasi yang dibangun oleh para sarjana untuk menjelaskan mengenai kedudukan Timur Tengah baik secara geografis, ekonomis, maupun ideologis. Salah satu negara yang paling krusial secara geopolitik di kawasan ini adalah Iran. Negeri yang mendeklarasikan sistem pemerintahannya sebagai Republik Islam ini adalah pemain penting di Timur Tengah.

Setelah keberhasilan revolusi di tahun 1979, Iran di bawah pimpinan spiritual tertinggi Ayatullah Khomeini mendeklarasikan sistem politik Iran sebagai Republik Islam. Politik luar negeri yang dijalankan di bawah sistem baru itu terus mempengaruhi konstelasi politik baik di Timur Tengah maupun global. Kebijakan luar negeri Iran selalu memposisikan dirinya sebagai kekuatan politik yang oposisional terhadap hegemoni global, yakni Amerika Serikat (AS) dan Barat.

Iran menjadi salah satu perkembangan paling penting di abad ke-21 di Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena kemunculannya sebagai kekuatan ketika Timur Tengah dalam keadaan ketidakhadiran kekuatan besar peringkat regional (Barry Rubin, 2006). Posisi politik itu terlihat mulai dari isu Palestina, Perang Teluk, Suriah, terorisme hingga nuklir. Meski isu nuklir telah muncul sejak berakhirnya Perang Dunia II, tapi isu ini menjadi salah satu isu utama dan panas dalam

geopolitik global, terutama setelah Perang Dingin berakhir dan serangan terorisme tahun 2001 ke AS. Peristiwa 9/11 menjadi tamparan keras bagi AS untuk kembali memperkuat pengaruh dan kekuatan aliansi di Timur Tengah. Gejala pembangunan militer dan nuklir Iran itulah yang melatarbelakangi AS mengumumkan politik penangkalan ganda (*dual containment*) di kawasan Teluk (Abd.Rahman, 2003).

Hubungan Iran pasca revolusi dengan dunia Barat adalah hubungan yang konfliktual dan konfrontatif. Padahal di Timur Tengah, ada juga Israel yang memiliki teknologi nuklir untuk kepentingan militer. Negara Israel pun didirikan atas faktor ideologi yang sangat fundamental. Namun sikap Barat terhadap Israel sangat berbeda dengan terhadap Iran. Bagaimanapun Iran dianggap Barat sebagai ancaman bagi kestabilan keamanan kawasan, bukan Israel. Meskipun aktivitas nuklir Iran telah diawasi oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dan tidak melanggar *Non Proliferation Treaty* (NPT), negara-negara Barat tetap saja melakukan intervensi terhadap pengembangan nuklir Iran (Yogyakarta, 2011). Iran berulang kali menegaskan bahwa teknologi nuklir yang dikembangkannya bertujuan untuk kepentingan sipil, tapi kenyataannya Barat lebih percaya Israel ketimbang Iran.

Iran tidak saja menghadapi tekanan dari AS dan Barat karena kebijakan pengembangan nuklirnya. Negara-negara Arab di kawasan juga memberi dukungan terhadap tekanan tersebut. (Lambang & Pristiandaru, 2022) Sehingga bagi Iran, persoalan nuklir tidak sebatas kebutuhan untuk kepentingan sipil. Tapi nuklir bagi Iran adalah alat diplomasi terbaik untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pada saat bersamaan sebagai penangkal (*deterrence*) terhadap ancaman yang datang dari geopolitik kawasan dan global (Mawardy, 2015).

Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah kajian akademik menjelaskan tentang hubungan ideologi dalam formulasi kebijakan

luar negeri Iran pasca revolusi. Namun tidak banyak yang mengkaitkannya hal tersebut dengan sikap kritis Iran terhadap Barat yang mengakibatkan hubungan konfliktual. Bahwa Iran setelah revolusinya di tahun 1979, tidak saja telah menyebabkan hubungannya dengan negara Islam lainnya terutama di Timur Tengah menjadi tidak harmonis, tapi juga terhadap Barat. Dalam penelitian yang dilakukan Ali Ansari dan Kasra Aarabi dari Tony Blair Institute for Global Change, disebutkan ada kekeliruan dalam cara pandang kebijakan Barat selama ini yang melihat berakhirnya Perang Dingin 1989 sebagai titik perubahan penting dalam geopolitik global. Padahal menurut Ali Ansari dan Kasra Aarabi (2019), peristiwa yang terjadi 10 tahun sebelum berakhirnya Perang Dingin, yaitu revolusi Islam di Iran tahun 1979 justru menjadi pemicu yang tak kalah strategisnya bagi perubahan dunia pada jangka panjang, khususnya terkait dengan relasi Barat terhadap Iran, dan dunia Islam pada umumnya. Revolusi tersebut bukan saja menggambarkan perubahan social politik di Iran, tetapi lebih dalam lagi adalah perubahan ideologi yang mengantarkan Iran saat ini selalu berada pada kedudukan kritis dan oposisional terhadap Barat. Negara teokrasi Iran dihadirkan untuk melayani ideologi revolusi, bukan sebaliknya (Aarabi & Ansari, 2019).

Salazar (2015) dalam jurnalnya berjudul *“Theocracy in Iran: From Ideology to Islamic Republic”*, lebih memberikan penjelasan dimana ideologi dalam konteks sistem politik Iran tidak sebatas seperangkat sistem keyakinan dan nilai bersifat kognitif yang dijadikan sebagai jalan hidup (*way of life*) dan pandangan-dunia (*worldview*), tetapi juga ditransformasikan oleh tokoh spiritual Syiah tertinggi ketika revolusi yaitu Ayatullah Khomeini ke dalam sistem infrastruktur politik yang disebut *Wilayat al Faqih*. Namun Salazar tidak menampilkan eksplanasi filosofis dan epistemologis mengenai kronologi formulasi *wilayat al faqih* yang berakar dari sistem keyakinan tentang dua belas imam Syiah (*itsna ‘asyariah*) dan imam ke-duabelas yang diyakini kaum Syiah sebagai Imam Mahdi (*Imamiah*). Padahal faktor filosofis dan epistemologis ini

menjadi esensi utama dari ideologi politik Syiah sehingga men-*drive* negeri teokrasi tersebut bersikap kritis dan oposisional tidak saja di Timur Tengah, tapi juga terhadap Barat.

Sementara Przemyslaw Osiewicz (2019, 2021) menyatakan sebagai sesuatu yang mustahil untuk menganalisa politik luar negeri Iran saat ini hanya dalam konteks kepentingan politik dan ekonomi, tanpa mengaitkannya dengan pondasi dasar dari sistem ideologi Iran itu sendiri. Dalam jurnalnya berjudul *“Ideologizing and Fundamentalism in Iranian Foreign Policy under the Hassan Rouhani Presidency”*, Osiewicz melihat ada dua kelompok besar dalam sistem politik di Iran, yaitu kelompok yang memegang teguh prinsip-prinsip ideologi Syiah Imamiah (*principlist*), dan kelompok reformis yang memilah faktor-faktor dalam ideologi Syiah demi mencapai kepentingan nasional. Osiewicz melihat Presiden Hassan Rouhani menjalankan pemerintahan Iran – sebagaimana pada periode Khatami - dalam batas level ideologisasi yang lebih moderat daripada fundamentalisme (Osiewicz, 2019) sehingga mampu membuka komunikasi politik dalam isu perjanjian nuklir dengan Barat. Namun hal tersebut diyakini sebatas strategi politik luar negeri Iran untuk mempertahankan teokrasi dan revolusi sebagai kepentingan nasional (Osiewicz, 2021).

Sikap Iran yang demikian, tentunya mengundang pertanyaan mendasar mengenai faktor determinasi utama yang mempengaruhi perilaku negeri para mullah tersebut dalam dinamika politik internasional. Mengapa politik luar negeri Iran bersifat kritis dan oposisional terhadap hegemoni AS dan Barat? Hipotesis penelitian ini melihat faktor ideologi Syiah tentang Imamiah atau Imam Mahdi menjadi faktor konstruktif utama yang memandu politik luar negeri Iran menjadi kritis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis kausal. Artinya, menggambarkan faktor determinan kausalitas yang mempengaruhi (sebab) dan dipengaruhi (akibat). Faktor yang mempengaruhi disini adalah sejarah, nilai, norma dan lebih utama lagi ideologi dalam tubuh masyarakat Iran yang merupakan unsur-unsur konstruktivisme. Sedangkan faktor dipengaruhi adalah politik luar negeri Iran yang kritis dan konfrontatif terhadap hegemoni AS dan Barat.

Berbeda dengan kuantitatif, penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung, dan atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. (Yusuf, 2019) Sementara Creswell berpandangan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada peneliti sebagai instrument kunci (*key instrument*), yang dimana peneliti adalah pihak yang mengumpulkan, memeriksa, dan menafsirkan informasi serta data yang didapatkannya baik dari wawancara ataupun dokumen (Creswell, 1994).

Fokus penelitian ini pada faktor-faktor konstruktif yang membentuk pola perilaku politik luar negeri Iran dalam lingkungan politik internasional. Untuk menganalisa fokus tersebut, penelitian ini menghimpun data dari sumber-sumber kepustakaan (*library research*) dan berbagai informasi dari tautan-tautan resmi ataupun media massa. Kemudian dianalisa menggunakan teori budaya anarki dan identitas kolektif dalam pendekatan konstruktivisme yang dikorelasikan dengan teori politik luar negeri. Subjek penelitian dalam kajian ini tentunya adalah pemerintah Iran yang melakukan aktivitas politik luar negeri. Sedangkan objek dari penelitian adalah ideologi sebagai faktor konstruktivisme yang mempengaruhi sikap politik luar negeri Iran terhadap AS dan Barat.

Kerangka Teori Konseptual

Konstruktivisme Hubungan Internasional

Konstruktivisme berpendapat bahwa realitas internasional secara sosial dikonstruksi oleh struktur kognitif yang memberikan makna terhadap dunia material. Teori ini muncul dari perdebatan tentang metode ilmiah dari teori-teori hubungan internasional dan peran teori dalam produksi kekuasaan internasional. Konstruktivisme lahir dari sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan tradisional Neorealisme dan Neoliberalisme. Pendekatan konstruktivisme yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua teori, yaitu pertama, budaya anarki internasional sebagai hasil dari relasi ideasional intersubjektif; dan kedua, identitas kolektif yang bersumber dari histori, nilai dan ideologi.

Budaya Anarki

Para ilmuwan bersepakat bahwa kondisi sistem internasional pasca Perang Dunia berada pada situasi yang anarki. Namun determinasi anarki bagi kelompok konstruktivis berbeda dengan konsep anarki yang dikembangkan kelompok realisme struktural atau neorealisme. Bagi pihak realisme struktural, anarki adalah keadaan dalam politik internasional yang bersifat *self-help*, dan hal tersebut merupakan *given* dari struktur internasional. Kondisi anarki dalam lingkungan strategis internasional sebagaimana halnya ekosistem lingkungan hidup yang alamiah. Argumentasi ini ditolak kelompok konstruktivis yang melihat situasi anarki dalam politik internasional lebih disebabkan interaksi antar-aktor yang dikonstruksi oleh ide, nilai, norma dan identitas intersubjektif di dalamnya. Ide, nilai, dan norma dalam pendekatan ini seringkali terepresentasikan secara baik dalam identitas kolektif, ideologi, pengetahuan umum (*common knowledge*), ataupun keyakinan bersama (*shared ideas*). Dalam proses interaksi tersebut terjadi proses saling mempengaruhi sehingga memberikan “bentuk” terhadap struktur internasional. Dalam interaksi itu negara membawa subyektifitas *meanings* masing-masing. Ini yang dimaksud

Alexander Wendt sebagai budaya anarki (Alexander Wendt, 1999; Robert Jackson, 2016).

Ada tiga pola budaya anarki, yaitu Hobbesian, Lockean, dan Kantian. Interaksi dengan negara lain menciptakan satu struktur identitas dan kepentingan, struktur tidak mempunyai eksistensi atau kekuatan kausal selain dari proses (Alexander Wendt, 1999; Robert Jackson, 2016).

Pertama, pola Hobbesian (Thomas Hobbes) yaitu keadaan anarki dalam struktur sosial menciptakan suatu keadaan dimana aktor negara lain yang sifatnya setara dianggap sebagai musuh sehingga agar dapat bertahan dalam struktur tersebut negara harus saling menghancurkan satu sama lain agar dapat bertahan (*survive*). Negara saling memandang sebagai musuh sehingga membentuk pola yang konfliktual (Robert Jackson, 2016).

Kedua, pola Lockean (John Locke), dimana dalam struktur tersebut negara-negara yang sifatnya setara saling bersaing antara satu sama lain sehingga dapat bertahan (*survive*), disini negara saling melumpuhkan namun tidak sampai menghancurkan. Sehingga terbentuk pola interaksi yang kompetitif (Robert Jackson, 2016). Ketiga, pola Kantian (Immanuel Kant). Pola ini adalah kebudayaan anarki yang sifatnya saling berteman dan bekerjasama. Budaya Kantian di kalangan demokrasi liberal yang terkonsolidasi sejak Perang Dunia Ke-2 (Robert Jackson, 2016). Bagi Kenneth Waltz (1979), sistem internasional terdiri dari beberapa kekuatan besar yang masing-masing berusaha untuk bertahan karena sistem berjalan secara anarkis (suatu kondisi yang dihasilkan karena tidak adanya otoritas sentral yang dapat mengaturnya). Di dalam kondisi yang anarkis seperti itu, setiap negara akan mempertahankan dirinya sendiri (Robert Jackson, 2016). Dengan menggunakan pendekatan ini akan dilihat pola anarki yang dilakukan Iran melalui dalam politik luar negerinya.

Identitas Kolektif

Teori Konstruktivisme fokus kepada aspek kepentingan dan identitas negara sebagai produk yang dapat dibentuk dari proses sejarah yang khusus. Para konstruktivis memberi perhatian pada wacana umum (*common discourse*) yang ada di tengah masyarakat karena wacana merefleksikan dan membentuk keyakinan dan kepentingan, dan mempertahankan norma-norma yang menjadi landasan bertindak masyarakat (*accepted norms of behavior*). Dengan demikian konstruktivis memberi perhatian pada sumber-sumber perubahan (*sources of change*).

Konstruktivis memberikan perhatian kajiannya pada persoalan-persoalan bagaimana ide dan identitas dibentuk, bagaimana ide dan identitas tersebut berkembang dan bagaimana ide dan identitas membentuk pemahaman negara dan merespon kondisi di sekitarnya. Keyakinan mengenai struktur masyarakat yang dibentuk dari adanya gagasan-gagasan yang diyakini bersama (*shared ideas*), dan kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor ditentukan dari adanya *shared ideas* yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan dari setiap aktor tidak hanya ditentukan dari adanya kepentingan mereka, melainkan juga ditentukan oleh interaksi antar individu dalam lingkungan sekitarnya (struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya). Dalam hal ini, dunia sosial digambarkan konstruktivisme sebagai wilayah yang intersubjektif dan dinamis.

Dengan kata lain, konstruktivisme menjelaskan realita hubungan internasional sebagai *shared ideas*, dimana tindakan setiap aktornya tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri melainkan dipengaruhi juga oleh gagasan yang mereka bangun sendiri (Pramono & Purwono, 2010). Struktur atau *shared ideas* ini kemudian menjadi semacam aturan main (*norms*) bagi setiap aktor dalam masyarakat untuk melangsungkan interaksinya. Dalam pengertian lain, proses interaksi menanamkan pengetahuan (*knowledge*) atau pemahaman

mengenai diri sendiri (*self*), orang lain (*others*), kebutuhan, identitas, posisi sosial, hingga kepentingannya (Bilad, 2011).

Konstruktivisme menganut pandangan bahwa aspek ideasional di balik perilaku aktor akan selalu mengalami perubahan sebagai respon terhadap aneka dimensi sosial dan sosialisasi yang terus berlangsung. Dengan demikian konstruktivis selalu mengadakan proses konstruksi dan rekonstruksi terhadap fakta dan praktek sosial yang bekerja di balik tatanan politik global (I Gede Wahyu Wicaksana, 2018).

Politik Luar Negeri

Politik luar negeri itu pada dasarnya adalah “*action theory*”, atau kebijakan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Hans.J.Morgenthau, 1990). Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Jack C. Plano, 1999). Dengan kata lain, studi politik luar negeri berada *intersection* antara aspek dalam negeri suatu negara (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara.

Dengan menggunakan teori analisa politik luar negeri James N Rosenau dan Gavin Boyd, ada 4 faktor sumber yang secara umum telah meliputi dimensi internal dan eksternal, yaitu sumber sistemik (*systemic source*), sumber masyarakat (*societal source*), sumber pemerintah (*governmental source*), dan sumber idiosinkretik (*idiosyncratic source*) (Anak Agung Banyu Perwita, 2005; James N Rosenau, 1976). Kajian ini lebih

menitikberatkan penggunaan faktor sistemik (*systemic source*) dan faktor masyarakat (*societal source*).

Faktor sistemik (*systemic source*) merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan internasional, pola-pola aliansi yang terbentuk antar negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis. Sedangkan faktor masyarakat (*societal source*) bersumber dari lingkungan internal yang mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik, (Anak Agung Banyu Perwita, 2005) termasuk dalam hal ini adalah kongnitif umum berupa ideologi dalam masyarakat. Teori sumber sistemik (*systemic source*) berkaitan dengan teori budaya anarki digunakan untuk menganalisa bentuk politik luar negeri Iran pasca revolusi, serta bagaimana pola yang terbentuk tersebut dipengaruhi oleh ideologi dan identitas kolektif bangsa Iran sebagai faktor masyarakat (*societal source*).

Tabel 1. Relasi Pendekatan Konstruktivisme Dengan Teori Politik Luar Negeri Dari Rosenau dan Boyd.

	Teori Politik Luar Negeri (James Rosenau)	
	Faktor Eksternal	Faktor Internal
Pendekatan Konstruktivisme	Sumber Sistemik	Sumber Sosial
	Budaya Anarki	Identitas Kolektif (ideologi)

(Tabel diolah sendiri)

Pembahasan

Sejak revolusi tahun 1979, hubungan Iran dengan Barat, terutama AS sebagian besar diwarnai permusuhan. Relasi itu seringkali berkembang ke dalam konflik langsung, sementara pada fase yang lain

terjadi negosiasi atau kerjasama diam-diam pada isu-isu tertentu. Selama lebih dari dua dekade, para pejabat AS secara konsisten mengidentifikasi dukungan rezim Iran terhadap kelompok militan Timur Tengah sebagai ancaman signifikan bagi kepentingan dan sekutu AS, dan membatasi perluasan program nuklir Iran menjadi tujuan kebijakan utama AS (Katzman, 2021). Permusuhan AS dan Barat terhadap Iran merupakan wajah yang sangat bertolak belakang dengan hubungan mereka sebelum revolusi 1979. Permusuhan begitu kuat terhadap Iran, karena negeri para mullah tersebut telah mengusir AS yang kemudian mengubah geopolitik di Timur Tengah. Apalagi setelah revolusi, Iran di bawah rezim yang baru mengobarkan ekspor revolusi yang dengan cepat menyebar ke dunia Islam. Hal ini menjadi keadaan yang sangat menyulitkan bagi AS dan Barat untuk menghegemoni Timur Tengah di tengah bipolaritas Perang Dingin.

Timur Tengah menjadi kawasan sangat strategis bagi kepentingan Barat, bukan hanya karena posisi kawasan yang menghubungkan Timur dan Barat atau Asia-Afrika dan Eropa, tapi kawasan ini juga menyimpan kandungan energi yang paling dibutuhkan dunia. Karena itu bagi Barat, membangun aliansi dengan negara-negara di Timur Tengah adalah keharusan. Barat tidak dapat mengabaikan Timur Tengah.

Ada dua faktor penting dalam memahami dinamika politik di Timur Tengah, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah Islam sebagai politik identitas yang tidak bisa dipisahkan apalagi dihilangkan dari Timur Tengah. Peristiwa-peristiwa penting berskala regional maupun global di kawasan ini selalu berkaitan dengan Islam. Misalnya, gerakan Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme selalu relevan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa politik era 1950, 1960, 1979 hingga revolusi Arab Spring 2011 (Bromley, 1993).

Faktor kedua adalah eksternal, yaitu sumber daya alam berupa energi utama yang menjadi kebutuhan dunia, minyak bumi. Minyak

bumi menjadi alasan utama kehadiran AS dan Barat di Timur Tengah. Karena industrialisasi yang berlangsung di AS dan Barat bergantung kepada energi yang bersumber dari Timur Tengah (Bromley, 1993). Karena itu sangat bisa dimengerti jika Timur Tengah menjadi kawasan yang tidak pernah berhenti melakukan transisi. Stabilitas menjadi hal yang sulit dicapai di kawasan ini (Robert D. Kaplan, 2013).

Arab Saudi, Iran, Irak, Mesir dan Turki adalah negara-negara yang dalam sejarahnya memiliki peran kunci dalam menentukan arah politik kawasan (Sya' & Rofii, 2015). Kerasnya sikap Iran, tentunya akan menimbulkan kekhawatiran bagi AS dan Barat tentang masa depan mereka. Akibat sikap kerasnya yang berdampak pada perubahan geopolitik di kawasan, Iran harus menerima sanksi embargo dari AS dan Barat. Iran, kendati berada dalam situasi terjepit karena embargo DK PBB namun kemampuan mereka di bidang militer sangat memadai dan kepemilikan sumber daya minyak dan gas yang melimpah menjadi alasan ekonomi penentu kuatnya Iran, termasuk jika menempatkan kepemilikan instalasi nuklir sebagai bagian penting kekuatan Iran (Eisenstadt, 1996). Meskipun ketegangan hubungan Iran dengan Barat pasang surut, tapi tetap pola relasi atau politik luar negeri Iran terhadap Barat tidak berubah, yaitu pola konfliktual.

Mengapa Iran Bersikap Keras terhadap AS dan Barat?

Sebelum revolusi Islam pecah tahun 1979, Iran adalah negara kuat di Timur Tengah yang menjadi aliansi AS dan Barat. Iran ketika itu di bawah rezim Shah Reza Pahlevi memberlakukan sistem kerajaan dengan demokrasi sekuler. Lebih dari itu, AS bahkan membekali Iran dengan bantuan militer dan teknologi nuklir demi menjamin kepentingan AS di kawasan (Behrang, 2012; Kelsey Davenport, 2022; Kibaroglu, 2007).

Berbeda dengan negara-negara Arab yang hanya mewarisi kesukuan atau klan, sementara Iran sebagaimana disebutkan Ira M

Lapidus (1999), tidak dapat melepaskan diri dari rangkaian proses sejarah panjang yang membangun struktur peradabannya yang kompleks. Mulai dari Persia, Dinasti Islam Safawiyah, Dinasti Saljuk/Qajar, Monarki Shah Pahlevi, hingga pada Republik Islam Iran dibawah Khomeini. Iran modern mewarisi pola institusi negara, agama dan kesukuan yang turut mewarnai sejarahnya sampai sekarang ini (Ira M Lapidus, 1999). Hal ini menjadi faktor konstruktivisme paling mendasar yang selanjutnya membentuk pola sikap politik luar negeri Iran terhadap hegemoni AS dan Barat di kawasan.

Teknologi nuklir yang dinikmati Iran saat ini bukanlah teknologi yang murni didapatkan secara mandiri dan independen hasil dari keunggulan domestik, melainkan karena faktor eksternal. Yaitu karena kedekatan negeri tersebut dengan AS pada tahun 1943, tepatnya pada saat Franklin D Roosevelt, Winston Churchill dan Joseph Stalin bertemu di Teheran untuk membahas ancaman Nazi Jerman dan Fasisme Jepang dalam Perang Dunia kedua. Pada tahun 1947, pertemuan *Pentagon Talks* memberikan pengakuan urgensi strategis Iran sebagai aktor penting di Timur Tengah. Ketika itu, belum ada aktor lain yang dianggap penting dan strategis bagi Barat di Timur Tengah selain Iran yang dapat memenuhi kebutuhan terhadap minyak mentah dan penghalau bagi ekspansi komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet (Kıbaroğlu, 2007). Bahkan Arab Saudi pun masih dalam kondisi yang belum diharapkan banyak oleh Barat.

Kemesraan hubungan Iran dengan Barat berlanjut hingga AS mempercayakan teknologi pengembangan nuklir kepada Iran tahun 1957 yang ditandai dengan penandatanganan *Agreement for Cooperation Concerning Civil Uses of Atoms* atau *Atoms for Peace Program* (Kıbaroğlu, 2006). Perjanjian ini yang menjadi awal pengembangan teknologi nuklir di Iran. *Atoms for Peace Program* merupakan program Presiden AS Dwight Eisenhower untuk berbagi teknologi nuklir dengan tujuan damai. Dua tahun kemudian yaitu di tahun 1959, Iran membangun

fasilitas pengembangan nuklir mandiri yang dinamakan *Tebran Nuclear Research Center* (TNRC) di Universitas Teheran yang merupakan langkah besar pertama Iran dalam pengembangan program nuklirnya. AS menyuplai bahan bakar nuklir dan menjual *Thermal Reactor* bertenaga 5 Megawatt untuk TNRC (Kıbaroğlu, 2007). Pada 1967, AS kembali mengirimkan reaktor sesuai kesepakatannya dengan Iran melalui *American Machine and Foundry* (Kıbaroğlu, 2007).

Namun semua kemesraan ini menjadi sirna dalam sekejap ketika secara mengejutkan dua belas tahun kemudian di tahun 1979, revolusi yang berbasiskan pada ideologi Syiah Imamah pecah di Teheran dan kota-kota besar lainnya di Iran. Ayatullah Khomeini, pemimpin spiritual Syiah Iran, kembali ke negerinya setelah 14 tahun diasingkan ke Paris, menjadi salah satu titik perkembangan signifikan dari apa yang disebut sebagai Revolusi Islam Iran. Saat itu diperkirakan jutaan pendukungnya berbaris di jalan-jalan kota Teheran untuk menyaksikan kembalinya sang imam (Barak, 2021). Revolusi yang digerakkan Khomeini tersebut, tidak saja telah menjatuhkan Shah Reza Pahlevi sebagai sekutu AS, tapi lebih menyakitkan dari itu yakni terjadi perubahan sistemik pada ideologi dan sistem ketatanegaraan di Iran. Perubahan sistemik tersebut dari sistem kerajaan yang sekuler kepada demokrasi-relijius berdasarkan ideologi Syiah Imamah atau Syiah Itsna Asyariah. Khomeini menyebut revolusi yang digerakkannya sebagai revolusi Islam. Dalam revolusi itu, bahkan kedutaan besar AS di Teheran sempat diblokade oleh kaum revolusioner lebih dari sebulan.

Meskipun peristiwa revolusi tersebut terjadi 43 tahun yang lalu, tapi dampak terhadap geopolitik kawasan dan global masih terus dinamis hingga periode Presiden AS Joe Biden saat ini. Presiden AS George W Bush pada tahun 2002 memasukkan Iran sebagai *'the axis of evil'* bersama Irak dan Korea Utara. Hubungan Iran dengan AS sejak itu tidak pernah membaik. Ketika Barack Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Obama menggunakan *soft diplomacy* guna

mencegah perluasan program nuklir Iran dengan mendorong Iran untuk terlibat dalam dialog terkait program nuklirnya. Pada tahun 2013, Hassan Rouhani terpilih sebagai Presiden Iran yang dianggap sebagai politisi yang lebih moderat dan pragmatis. Rouhani juga lebih mengutamakan melakukan negosiasi terkait solusi program nuklirnya guna mengakhiri embargo yang dialami Iran (Osiewicz, 2019; Saragih et al., 2020).

Siasat Presiden AS Barack Obama berhasil mendorong Iran ke dalam perundingan. AS dan Iran menyepakati perjanjian *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) pada tahun 2015 di Wina bersama China, Perancis, Jerman, Rusia, Inggris serta Uni Eropa atau yang disingkat dengan P5+1 (Mawardy, 2015; Saragih et al., 2020). Perjanjian ini berisi tentang kesediaan Iran untuk membatasi nuklirnya. Sebagai imbalan, Barat mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran. Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan mengurangi persediaan uranium yang ada sebesar 98 persen, pengurangan ini berlangsung selama 15 tahun, dan Iran akan dibatasi memperkaya uranium sebesar 3,67 persen. Selain itu, semua aktivitas nuklir Iran akan dipantau oleh IAEA dengan memberi kewenangan untuk menggunakan teknologi pemantauan yang canggih (Mawardy, 2015; Saragih et al., 2020).

Kondisi anarki dalam sistem politik internasional telah mendorong Iran memainkan dua pola budaya diplomasi yang berbeda pada sebelum dan sesudah 1979. Sebelum revolusi 1979, pola hubungan AS dan Iran bersifat Kantian (Immanuel Kant) yang mengedepankan fatsun-fatsun kerjasama (*cooperative*) karena keduanya memiliki persamaan persepsi memperkuat hegemoni aliansi di Timur Tengah. Sementara setelah 1979, pola hubungan keduanya berbalik seratus delapan puluh derajat menjadi Hobbesian (Thomas Hobbes) yang bersifat konfliktual. Pola Hobbesian itu terus berlangsung

sepanjang Iran dibawah rezim yang dianggap AS sebagai fundamentalisme Islam (Robert Jackson, 2016).

Tentunya perubahan revolusioner ini telah memposisikan AS dalam situasi dilema keamanan (*security dilemma*) yang sulit diterima. Karena bagaimanapun, rezim Republik Islam Iran telah mewarisi teknologi nuklir yang diperolehnya dari Barat semasa kekuasaan Shah Reza Pahlevi. Ketidaktulusan tersebut yang mendasari AS dan Barat terus melakukan berbagai cara menekan Iran, mulai dari pemberian sanksi embargo hingga pengawasan ketat berstandar ganda terhadap program pengayaan nuklir Iran melalui lembaga pemantau *IAEA* (*International Atomic Energi Agency*).

Ideologi dalam Politik Luar Negeri Iran

Sejak revolusi 1979, konstitusi Iran dibangun berdasarkan ideologi Syiah Itsna Asyariah atau Syiah Imamiah. Khomeini sebagai pemimpin revolusi ketika itu, mengkonstruksi kembali tatanan negara Iran, dan membentuk lembaga otoritas kolektif tertinggi yang disebut *wilayat al faqih* sebagai implementasi ideologi Syiah Imamiah. Dari konstitusi baru inilah, kepentingan nasional dan politik luar negeri Iran dibawah pengawasan lembaga otoritas tertinggi *wilayat al faqih*. Konsep *wilayat al-faqih* ini merupakan versi Syi'ah tentang negara Islam. Jadi, hukum tidak cukup diundangkan sesuai syariat saja, namun negara juga pada intinya harus beroperasi secara Islami (Roy, 1996).

Lembaga *wilayat al faqih* memiliki kedudukan sentral, strategis dan mendasar dalam ideologi Imamiah, tidak hanya dalam struktur ketatanegaraan Iran. Sehingga lembaga yang disebut sebagai simbolik teokrasi ini tidak tergantikan hingga saat ini. *Wilayat al faqih* berkenaan dengan keyakinan kaum Syiah Itsna Asyariah atau Syiah Imamiah tentang konsep kegaiban (*occultation*). Setelah berakhirnya periode kenabian, hak-hak tersebut beralih kepada pemimpin negara (*ulu al-amr*) yang menurut kepercayaan mereka adalah para imam yang

berjumlah dua belas (*itsna asyariyah*) atau disebut juga Syiah Imamiah (KH Irfan Zidny, 1998). Kegaiban dalam ideologi Syiah Imamiah yang dimaksud adalah kegaiban Imam Mahdi yang diyakini mereka sebagai imam ke-dua belas yang ‘sedang hilang’ dan akan muncul di akhir zaman memberi pembelaan terhadap kaum Syiah.

Kegaiban (*occultation*) terbagi dalam dua tingkatan. **Pertama**, masa “kegaiban kecil” (*minor occultation* atau *ghaibab al-sughra*), yaitu ketika Imam Mahdi “bersembunyi di dunia fisik dan mewakili kepemimpinannya kepada para wakil imam”. **Kedua**, adalah apa yang disebut sebagai masa “kegaiban besar” (*major occultation* atau *ghaibab al-kubra*), yaitu masa sesudah meninggalnya keempat wakil imam sampai kedatangan kembali al-Mahdi pada akhir zaman. Untuk itulah Khomeini menulis buku yang berjudul *Vilayat-eFaqib* (Muhammad Kamil al-Hasyimi, 1989). Dalam masa penantian hingga menyambut kehadiran imam ke-duabelas tersebut, maka kaum Syiah terpanggil wajib membangun ‘panggung politik’ dalam bentuk negara (Muhammad Kamil al-Hasyimi, 1989). Khomeini bersama para pengikutnya berhasil meyakinkan kaum Syiah bahwa dalam masa ghaibnya Imam Mahdi justeru yang harus dilakukan oleh kaum Syiah adalah bersikap aktif dengan mempersiapkan ‘panggung’ bagi kemunculan-kembali (*zubur*) Imam Mahdi. Dengan kata lain, Imam al-Mahdi tak akan muncul kembali secara anakronistik di panggung sejarah. Hal itu hanya akan terjadi jika masyarakat sudah siap untuk dipimpinnya dalam merebut kekuasaan di muka bumi.

Revolusi doktrinal inilah yang mentransformasikan *quietisme Syiah* menjadi *aktivisme-revolusioner*. Doktrin ideologi ini juga yang mendorong Khomeini dan pengikutnya melakukan kudeta terhadap Shah Reza Pahlevi pada tahun 1979, lalu mendirikan sistem politik yang disebutnya sebagai Republik Islam Iran dan berjalan hingga saat ini. Tentunya, pemikiran politik Imamiah ini sangat berbeda dengan pemikiran politik Islam yang berkembang di kalangan Sunni. Hal ini

juga yang menjadi kekhawatiran negeri-negeri Arab Sunni di Timur Tengah bahwa Iran akan meluaskan pembangunan ‘panggung politiknya’ melalui kebijakan ekspor revolusi (Helmys, 2016). Revolusi doktrinal ini juga yang mengganggu ketenangan AS dan Barat di Timur Tengah. Karena ideologi tersebut mendorong penentangan terhadap hegemoni dan dominasi Barat di kawasan kaya minyak tersebut.

Hingga kini, sistem *wilayat al faqih* di Iran menyatakan bahwa Kepala Negara yang disebut *wali faqih* berkuasa seumur hidup. Kepala Negara dijabat oleh Pemimpin Tertinggi (*supreme leader*) yang dipilih oleh anggota *Wilayat al Faqih*. Calon Pemimpin Tertinggi adalah yang telah lulus uji dan mendapatkan gelar Ayatullah. Sudah dua Pemimpin Spiritual Tertinggi memimpin Iran sejak revolusi 1979, yaitu Ayatullah Ruhullah Khomeini yang wafat 1989, dan dilanjutkan Ayatullah Ali Khamenei hingga kini.

Selain faktor ideologi Imamah yang mengkonstruksi sistem politik dan ketatanegaraan saat ini, politik luar negeri Iran juga didorong oleh energi kebangsaan dan kebanggaan mereka sebagai imperium besar di masa lalu. Abdul Karim Soroush, seorang cendekiawan Iran menegaskan bahwa kebudayaan nasional Iran yang saat ini berkembang pada dasarnya hasil penetrasi tiga kebudayaan besar yang pernah bersinggungan dengan kebudayaan lokal, yaitu kebudayaan Persia (pra-Islam), kebudayaan Islam dan kebudayaan Barat (Mahmoud Sadri, 2002). Ideologi Syiah Imamah merupakan agama resmi Iran sejak berdirinya Dinasti Shafawiyah pada abad ke-16. Pendiri dinasti ini, Shah Ismail, mengaku sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad saw melalui garis imam-imam Syiah.

Walaupun pengaruh teologi Syiah begitu kuat dalam masyarakat Iran selama berabad-abad, akan tetapi wajah sosio-politik masyarakat Iran tidak bersifat monolitik. Banyak kekuatan-kekuatan politik dan ideologis yang tumbuh dalam masyarakat akibat persinggungan

kebudayaannya dengan berbagai kebudayaan asing, serta letaknya yang secara geografis menjadi pusaran peradaban dunia sejak lama. Faktor-faktor ini mempengaruhi pluralisme ideologi dan politik yang berkembang di Iran (Tamara, 1980).

Keberhasilan revolusi yang dipimpin Khomeini dalam kapasitas tertentu banyak didukung oleh beberapa kekuatan politik yang berkembang di Iran, seperti Front Nasionalis, Partai Komunis Tudeh, Partai Sosialis, Partai Republik Islam, Mujahidin Khalq, Fedayeen Khalq, Kaum Bazaar, dan lain sebagainya. Kekuatan-kekuatan ini setelah revolusi sebagian ada yang menjadi pendukung Republik Islam Iran, sebagian lagi ada yang menjadi oposisi bahkan pertentangan untuk menjatuhkan Khomeini beserta dengan rezimnya (Tamara, 1980).

Secara umum, gerakan sosial-politik dan pemikiran di Iran terbagi ke dalam dua kelompok, yakni kelompok konservatif dan kelompok moderat atau reformis. Masing-masing kelompok ini tersebar ke dalam polarisasi gerakan politik yang beragam tadi. Namun demikian, partai Islam seperti Partai Republik Islam seringkali disebut sebagai wadah kelompok konservatif. Kelompok konservatif diidentikan dengan kaum mullah yang berpegang teguh pada asas Islam dalam garis perjuangan politiknya. Sedangkan lawannya kelompok reformis lebih banyak terkumpul dalam wadah-wadah politik nasionalis. Hingga kini, pergulatan politik antar kekuatan-kekuatan tadi dan antara kaum konservatif dan reformis masih tetap mewarnai perjalanan politik Republik Islam Iran. Walaupun kaum mullah dari kaum konservatif, Partai Republik Islam masih tetap mendominasi konstalasi politik yang berlangsung (Riza Sihbudi, 1996).

Diplomasi Nuklir Iran

Diplomasi nuklir Iran dengan Barat yang diwakili AS dan IAEA sangat dinamis. Program nuklir Iran merupakan warisan era rezim Shah Reza Pahlevi, dimana ketika itu Iran mempersiapkan dirinya sebagai kekuatan besar dan pewaris peradaban Persia kuno yang berhak ke atas kawasan (Patrick Clawson, 2005). Teknologi nuklir Iran didapat melalui program *Atom for Peace* yang disuarakan Presiden AS Eisenhower tahun 1953 dalam pidatonya di Majelis Umum PBB (Behrang, 2012). Tujuan AS berbagi teknologi dengan Iran adalah untuk menjaga kekuatan dan keamanan AS dari nasionalisme Arab yang ketika itu pro kepada Uni Soviet (Behrang, 2012).

Namun demikian, Iran juga memperoleh teknologi nuklirnya melalui bekas industri senjata yang terletak di salah satu negara pecahan bekas Uni Sovyet (Eisenstadt, 1996). Materi uranium dan plutonium diperoleh dari bekas Uni Sovyet tersebut berhasil dikembangkan menjadi bom atom yang memudahkan Iran menciptakan senjata nuklir lebih cepat (Seth Carus, 2008). Beberapa negara juga menjadi mitra dekat Iran dalam pengembangan teknologi nuklir seperti China dan Pakistan, yang dilengkapi dengan pembelanjaan komponen-komponen nuklir dari Barat Eropa (Efraim Inbar, 2008).

Dengan berkembangnya nuklir di kawasan, maka secara geopolitik di Timur Tengah ada dua negara dengan kekuatan teknologi nuklir (*nuclear states*), yaitu Iran dan Israel. Kehadiran dua negara nuklir ini menciptakan Timur Tengah sebagai Bukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir (*Non-Nuclear Weapon Free Zone*). Kedua negara menjadi sekutu pada blok-blok kekuatan yang saling bertentangan, yaitu AS dan Rusia. Upaya Iran membangun teknologi nuklir bertujuan ganda. Pertama berfungsi sebagai strategi penangkal (*deterrent strategy*) dalam menghadapi berbagai ancaman kawasan maupun global. Kedua, sebagai *Balance of Power* terhadap kekuatan-kekuatan regional yaitu negara-negara Arab yang menjadi sekutu bagi AS, dan Israel (Sya' &

Rofii, 2015). Barry Rubbin melihat dinamika politik Arab yang terjadi di Timur Tengah tidak dapat dipisahkan dari pengaruh nuklir Iran (Barry Rubin, 2007).

Kemampuan Iran membangun teknologi nuklir tersebut telah menimbulkan keraguan dan ketakutan negara-negara Arab mengenai masa depan Timur Tengah. Negara-negara Arab dihadapkan pada dilema keamanan (*security dilemma*) kawasan yang ditimbulkan oleh Iran dan Israel sebagai dua negara yang dimusuhi Arab karena dua faktor, yaitu nuklir dan ideologi. Sebelum revolusi di Iran pecah tahun 1979, negara-negara Arab yang mayoritas muslim Sunni menjadikan Israel yang negara Yahudi sebagai ancaman. Permusuhan tersebut terjadi hingga pecah perang Arab-Israel pada tahun 1948, 1956 dan 1967. Namun setelah revolusi Syiah pecah di tahun 1979, permusuhan negara-negara Arab ditambah dengan kekalahan mereka dalam perang terhadap Israel, bergeser kepada Iran. Permusuhan negara-negara Arab karena kekhawatiran terhadap Iran mengeksport revolusi Syiahnya ke kawasan. Apalagi jika upaya ekspor revolusi tersebut didukung oleh kekuatan nuklir. Bagi sebagian negara Arab, ancaman Iran lebih berbahaya daripada Israel. Meskipun Iran sebenarnya juga bermusuhan dengan Israel dalam isu Palestina. Ketakutan akan ekspor revolusi tersebut meletuskan Perang Irak-Iran pada tahun 1980 yang berakhir 1988 (Britannica, n.d.).

Karena itu, salah satu langkah yang ditempuh negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan anggota *the Gulf Cooperation Council* (GCC), adalah dengan mencari perlindungan '*a nuclear umbrella*' kepada kekuatan Barat, terutama dari AS (Lambang & Pristiandaru, 2022). Negara-negara ini meminta Washington agar dapat memberikan jaminan pertahanan dan keamanan dari kemungkinan ancaman ataupun serangan dari Iran (Barry Rubin, 2007). Negara-negara GCC melihat Iran sebagai sebuah ancaman langsung (Barry Rubin, 2007). Bahkan tidak saja kepada AS, negara-negara Arab juga terus

mengembangkan hubungan diplomatik dengan kekuatan-kekuatan besar dan organisasi regional di Eropa, seperti EU dan NATO. Upaya negara-negara Arab memperkuat hubungan dengan organisasi-organisasi tersebut dalam rangka *umbrella strategy*. GCC membeli komponen persenjataan militer konvensional dan pesawat perang sebagai ‘payung pertahanan’ (*defensive umbrella*) (Barry Rubin, 2007).

Dalam rangka mempertahankan kepentingan nasionalnya terkait pengembangan teknologi nuklir, Iran seringkali memainkan diplomasi tarik ulur agar tekanan yang diberikan Barat dapat dikelola dengan baik. Karena bagaimanapun, Barat sangat berkeinginan untuk menghentikan program nuklir Iran yang dilihatnya sebagai ancaman terhadap hegemoni AS di Timur Tengah. Seringkali ketegangan hubungan Iran dengan AS disebabkan faktor Israel. Israel juga khawatir terhadap kemajuan teknologi nuklir Iran (Abd.Rahman, 2003). Apalagi Iran saat ini adalah negeri yang dipimpin oleh sistem politik konservatif yang dimata AS sebagai fundamentalisme Islam.

Tarik lulu diplomasi nuklir Iran terlihat dari sikapnya menghadapi tekanan-tekanan AS dan Barat melalui IAEA. Pada tahun 2015, Iran akhirnya menyepakati desakan AS untuk masuk ke dalam Kerjasama *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) bersama China, Perancis, Jerman, Rusia, Inggris serta Uni Eropa. P5+1 merupakan wadah kerjasama multilateral yang diinisiasi AS dan Barat untuk menekan Iran secara *soft diplomacy* agar Iran secara perlahan mengurangi kemampuan teknologi nuklirnya. Namun setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS pada 2017, setahun berikutnya Trump memutuskan AS keluar dari perjanjian yang disebutnya justru menguntungkan Iran (Fitria Ulfiani, 2020). Bagi Trump, Iran harus disikapi dengan keras agar mau membatalkan program nuklirnya.

Kesimpulan

Sikap politik luar negeri Iran yang kritis terhadap Amerika Serikat dan Barat pasca revolusi 1979 dipengaruhi faktor sejarah dan ideologi. Kedua faktor tersebut mengkonstruksi pola politik luar negeri Iran sehingga membentuk dinamika geopolitik di kawasan yang selalu dinamis. Revolusi tersebut terjadi 43 tahun yang lalu di masa Perang Dingin. Meski bipolaritas Perang Dingin telah berakhir dan kepemimpinan Iran bergantian antara kelompok tradisional dan modernis, tetapi politik luar negeri Iran terhadap AS dan Barat tetap tidak berubah.

Dari faktor sejarah, revolusi 1979 merupakan titik balik (*turning point*) perubahan sikap politik luar negeri Iran terhadap Barat. Sebelum revolusi itu terjadi, Iran adalah sahabat sekaligus aliansi AS dan Barat di kawasan. Iran menjadi bagian dari kepentingan nasional AS dalam menghadapi pengaruh komunisme dan Uni Sovyet terhadap negara-negara Arab. Kedekatan AS dan Iran ditunjukkan dengan keterbukaan Barat memberikan bantuan teknologi nuklir ke negeri para mullah tersebut.

Namun revolusi Syiah yang digerakkan Ayatullah Khomeini tahun 1979, membalikkan keadaan politik dalam negeri dan luar negeri Iran. Revolusi tersebut telah mencampakkan AS tidak saja dari Iran, tapi juga Timur Tengah. Pada revolusi tersebut bahkan kedutaan besar AS di Teheran disandera kaum revolusioner dalam waktu cukup lama. Lebih mengecewakan lagi, AS tidak sempat memblokir teknologi nuklir yang diberikan.

Sementara dari faktor ideologi, revolusi tersebut mengubah secara dramatik dan radikal sistem politik kerajaan sekulerisme Iran menjadi pemerintahan dengan sistem politik Republik Islam yang berbasiskan pada nilai-nilai revolusioner Syiah Imamiah atau Itsna Asyariyah. Dalam sistem politik pasca revolusi, kekuasaan tertinggi dipegang kepemimpinan kolektif yang disebut *wilayat al faqih*. Ketua dari lembaga ini disebut *wali faqih* yang bergelar ayatullah dan menjabat

seumur hidup. Sejak berbentuk Republik Islam, Iran dipimpin dua pemimpin tertinggi, yaitu Ayatullah Khomeini yang meninggal 1989, dan dilanjutkan Ayatullah Khamanei hingga saat ini. Keberadaan lembaga *wilayat al faqih* tidak saja mendasar secara ideologi, tapi juga inti dari ketatanegaraan Republik Islam Iran. Pembentukan negara Republik Islam Iran didasarkan pada pemikiran Khomeini bahwa kaum Syiah harus mempersiapkan ‘panggung politik’ dalam rangka menyambut kedatangan kepemimpinan imam kedua belas yang disebut Imam Mahdi.

Konstruksi ideologi dan pemerintahan seperti ini yang menjadi penghalang bagi terbangunnya kembali hubungan harmonis Iran dengan AS dan Barat. Iran menyebut konsep politik yang mengkombinasikan ide-ide agama dengan ide demokrasi seperti yang dipraktikkannya saat ini sebagai Teo-demokrasi. Sejak perubahan itu, politik luar negeri Iran selalu kritis terhadap hegemoni AS dan Barat baik di kawasan maupun global. Hubungan Iran dengan Barat selalu konfliktual. Iran senantiasa memainkan diplomasi nuklir untuk mempertahankan eksistensi dan kepentingan nasionalnya terhadap kawasan dan global. Meskipun Barat menggunakan berbagai jalan untuk menekan Iran baik melalui diplomasi perjanjian, organisasi internasional, maupun sanksi ekonomi.

Daftar Pustaka

- Aarabi, K., & Ansari, A. (2019). Ideology-and-Iran-s-Revolution-How-1979-Changed-the-World. *Tony Blair Institute for Global Change*, 1–31.
- Abd.Rahman, M. (2003). *Iran Pasca Revolusi:Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*. Kompas.
- Akbar, H. (2011). *Pengembangan Nuklir Iran Dan Diplomasi Kepada IAEA Hikmatul Akbar 1 Pinilih Kodimerinda 2*.

- Alexander Wendt. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
- Anak Agung Banyu Perwita, Y. M. Y. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya.
- Barak, H. (2021). *1-2-1979: Kembalinya Ayatollah Khomeini, Pemimpin Spiritual dan Revolusi Iran - Global Liputan6.com*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/global/read/4469468/1-2-1979-kembalinya-ayatollah-khomeini-pemimpin-spiritual-dan-revolusi-iran?site=liputan6>
- Barry Rubin. (2006). The Rise of Iran as a Regional Power. *Middle East Review of International Affairs (MERLA)*, 10(2), 142–151. <https://doi.org/10.1177/0974928420917801>
- Barry Rubin. (2007). Iran's Nuklir And Syria's Iraq Adventures. *MERLA (Middle East Review of International Affairs)*, 11. https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/meria/meria_200712/meria_200712_5_rubin.pdf
- Behrang, F. (2012). *U . S . Foreign Policy Interests and Iran ' s Nuclear Program* (Issue October). University of Saskatchewan.
- Bilad, C. Z. El. (2011). Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma. *Jurnal Studi Hubungan Internasional, Desember*, 66–84. <https://media.neliti.com/media/publications/131993-ID-konstruktivisme-hubungan-internasional-m.pdf>
- Britannica. (n.d.). *Iran-Iraq War | Causes, Summary, Casualties, & Facts | Britannica*. Britannica. Retrieved August 17, 2022, from <https://www.britannica.com/event/Iran-Iraq-War>
- Bromley, S. (1993). *Rethinking Middle East Politics: State Formation and Development*. Polity Press.

- Creswell, J. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publication.
- Efraim Inbar. (2008). The Need to Block A Nuklir Iran. *MERLA (Middle East Review of International Affairs)*, 10.
- Eisenstadt, M. (1996). *Iranian Military Power: Capabilities and Intentions*. Washington Institute for Near East Policy.
- Fitria Ulfiani. (2020). *Keputusan Donald Trump Keluar dari Perjanjian Nuklir dengan Iran | kumparan.com*. Kumparan. <https://kumparan.com/fitria-ulfiani/keputusan-donald-trump-keluar-dari-perjanjian-nuklir-dengan-iran-1tcfd3AJkUf>
- Hans.J.Morgenthau. (1990). *Politik AntarBangsa* (S.Maimoen (ed.)). Yayasan Obor Indonesia.
- Helmys, N. (2016). Ekspor Revolusi Islam dan Identitas Republik Islam Iran. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 5(2), 194. <https://doi.org/10.25077/ajis.5.2.194-209.2016>
- I Gede Wahyu Wicaksana. (2018). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik*. Airlangga University Press.
- Ira M Lapidus. (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam*. Rajawali Press.
- Jack C. Plano, R. O. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Abardin.
- James N Rosenau, K. W. T. (1976). *World Politics: An Introduction* (G. Boyd (ed.)). Free Press.
- Katzman, K. (2021). Iran: Internal politics and U.S. policy and options (updated). *Iran: U.S. Relations, Foreign Policies and Sanctions*, 119–168.
- Kelsey Davenport. (2022). *Timeline of Nuclear Diplomacy With Iran*. Arms Control Association. <https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Nuclear->

Diplomacy-With-Iran?goal=0_086cfd423c-35ac58eae5-33891257

- KH Irfan Zidny. (1998). “Bunga Rampai Ajaran Syiah.” In Umar Abduh (Ed.), *Mengapa Kita Menolak Syiah* (pp. 30–31). LPPI.
- Kıbaroğlu, M. (2006). Good for The Shah, Banned for Mullah: The West and Iran’s Quest for Nuclear Power. *The Middle East Journal*, 60, 207–232. <https://www.jstor.org/stable/pdf/4330247.pdf?refreqid=search%3Acdd53f7130101aea918dbb4e6%0A1c0659>
- Kıbaroğlu, M. (2007). Iran’s Nuclear Ambitions from a Historical Perspective and the Attitude of the West. *Taylor & Francis*, 43, 223–245. <https://doi.org/10.1080/00263200601114083>
- Lambang, D., & Pristiandaru. (2022). *AS dan Arab Saudi Sepakat Cegah Iran Dapatkan Senjata Nuklir*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2022/07/17/114600470/as-dan-arab-saudi-sepakat-cegah-iran-dapatkan-senjata-nuklir>
- Mahmoud Sadri, A. S. (2002). *Abdul Karim Soroush: Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama* (Abdullah Ali (ed.)). Mizan.
- Mawardy, Z. N. U. (2015). *Diplomasi Iran Dalam Mempertahankan Program Nuklir Melalui Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa)*.
- Muhammad Kamil al-Hasyimi. (1989). *Hakikat Akidah Syiah*. Bulan Bintang.
- Osiewicz, P. (2019). Ideologizing and Fundamentalism in Iranian Foreign Policy under the Hassan Rouhani Presidency. *European, Middle Eastern, & African Affairs*, 2018, 109–121. <https://www.researchgate.net/publication/337548007>
- Osiewicz, P. (2021). *Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: Between*

Ideology and Pragmatism. Routledge Taylor and Francis.
<https://www.routledge.com/Foreign-Policy-of-the-Islamic-Republic-of-Iran-Between-Ideology-and-Pragmatism/Osiewicz/p/book/9780367863067>

Patrick Clawson, M. R. (2005). *Eternal Iran. Continuity and Chaos*. Palgrave Macmillan.

Pramono, S., & Purwono, A. (2010). Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik. *Spektrum*, 7(2), 14–15.
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/485>

Riza Sihbudi. (1996). *Biografi Politik Imam Khomeini*. Gramedia Pustaka Utama.

Robert D. Kaplan. (2013). *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflict and the Battle Against Fate*. Random House.

Robert Jackson, G. S. (2016). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. Pustaka Pelajar.

Roy, O. (1996). *Gagalnya Islam Politik*. Serambi.

Salazar, V. A. (2015). Theocracy in Iran: From an Ideology to an Islamic Republic. *SSRN Electronic Journal, February*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2672828>

Saragih, H. M., Lestari, M. M., & Muis, N. (2020). Posisi Republik Islam Iran Dalam Program Nuklir Dalam Perspektif Amerika Serikat. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i1.1365>

Seth Carus. (2008). Iran and Weapons Of Mass Destruction. *MERLA (Middle East Review of International Affairs)*, 3.

Sya', M., & Rofii, R. (2015). Babak Baru Nuklir Iran: Memahami Manuver Iran dan Dinamika Politik Kawasan Timur Tengah. *Babak Baru Nuklir Iran*, 1(1). searchgate.net/publication/318774708_Babak_Baru_Nuklir_Iran_Memahami_Manuver_Iran_dan_Dinamika_Politik_Kawasan_Timur_Tengah

Tamara, N. (1980). *Revolusi Islam*. Sinar Harapan.

Yusuf, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.